



PROBLEMATIKA KETIMPANGAN EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

Dewi Fatmala Putri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Andriani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Widya Ratna Sari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Faricha Lita Nabbila

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 68137

Korespondensi penulis: dewifatmalap@gmail.com, andriani@iainkediri.ac.id,

widyaratnasari99@gmail.com, farichalita@gmail.com

Abstrac

Economic inequality in Indonesia has become a critical issue in economic development. Despite the rapid economic growth bringing benefits, the impact of inequality is on the rise. This journal explores the aspects of economic inequality within the Indonesian economic system, covering causal factors, government mitigation efforts, and policy recommendations. Through theoretical examination, the paper elucidates the Pancasila economic system, emphasizing social justice and even distribution. The research method employed is qualitative descriptive, utilizing data from literature, news, and relevant regulations. The discussion highlights the complexity of economic inequality, challenges, and solutions in the context of the Pancasila economy. The analysis encompasses the role of the economic system in achieving national goals such as familial ties, togetherness, and balanced progress. Considering Yogyakarta as a case study, findings indicate persistently high inequality, particularly in urban areas. Gini ratio data reveals an increase in inequality, notably in urban areas, with Yogyakarta identified as the province with the highest level of inequality.

Keywords: *Economic inequality, economic system*

Abstrak

Ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi isu kritis dalam pembangunan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi pesat membawa manfaat, dampak ketimpangan semakin meningkat. Jurnal ini mengeksplorasi aspek ketimpangan ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia, mencakup faktor penyebab, upaya penanggulangan pemerintah, dan rekomendasi kebijakan. Melalui kajian teoritis, jurnal ini menjelaskan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data dari literatur, berita, dan regulasi terkait. Pembahasan menyoroti kompleksitas ketimpangan ekonomi, tantangan, dan solusi dalam konteks ekonomi Pancasila. Analisis mencakup peran sistem ekonomi dalam mencapai tujuan nasional, seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan keseimbangan kemajuan. Dengan mempertimbangkan situasi Yogyakarta sebagai studi kasus, temuan menunjukkan ketidaksetaraan yang masih tinggi, terutama di wilayah perkotaan. Data rasio Gini memperlihatkan adanya peningkatan ketimpangan, terutama di perkotaan, dengan Yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi.

Kata kunci: Ketimpangan ekonomi, system ekonomi

LATAR BELAKANG

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu kritis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Meskipun perkembangan ini telah membawa banyak manfaat, ada pula dampak yang tidak diinginkan, yaitu ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat. Fenomena ketimpangan ini telah menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Ketimpangan ekonomi dapat dilihat dalam berbagai aspek ekonomi, seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang adil. Kesenjangan ini menciptakan divisi sosial yang nyata antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Jurnal ini akan membahas berbagai aspek ketimpangan ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia. Oleh karena itu makalah ini akan membahas mengenai faktor penyebab ketimpangan perekonomian, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, juga akan mengusulkan beberapa solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif.

Jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia dan menginspirasi tindakan yang lebih efektif dalam menghadapinya. Dengan mengatasi ketimpangan ekonomi, Indonesia dapat menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, adil, dan merata bagi semua lapisan masyarakatnya.

KAJIAN TEORITIS

1. Sistem Ekonomi

Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. (Dumairy, 1996) Sebuah sistem ekonomi terdiri atas

- a. Unsur-unsur manusia sebagai subjek;
- b. Barang-barang ekonomi sebagai objek;
- c. Serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya dalam kegiatan berekonomi.

Sedangkan Sanusi dalam bukunya menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide- ide) yang saling memengaruhi satu dengan lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksi-distribusi-konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. (Sanusi, 2000)

2. System Ekonomi Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Pasal ini menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia sendiri menganut sistem Ekonomi Pancasila. Menurut Prof. Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya, sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem yang memadukan ideologi konstitusional Bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang diwujudkan melalui kerangka ekonomi demokrasi serta langkah-langkah ekonomi yang memihak dan memberdayakan seluruh masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (Sumodiningrat, 1999) Sistem ekonomi pancasila bukan merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, akan tetapi merupakan bagian dari keduanya. Ekonomi dinamakan ekonomi Pancasila karena dampak implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.

PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah. Jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa literatur, berita, dan buku dengan memperhatikan regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh pihak regulator yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. (Mutiasari, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan ekonomi menjadi kompleks ketika sudah dihadapkan dengan masalah-masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Ekonomi Pancasila muncul sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagian besar tidak menyukai ketidaksamaan sosial yang ada. Kedua sistem ekonomi yang lebih dulu ada lebih memacu pada pertumbuhan dibandingkan dengan pemerataan sehingga muncul gap sebagai jurang pemisah masyarakat. Sehingga dirasa tidak cocok ketika masuk kedalam bangsa Indonesia. Perdebatan panjang mengenai sistem ekonomi Indonesia hampir setara usia kemerdekaan RI. Kapitalisme yang sempat juga menjadi sistem ekonomi di Indonesia memang memberikan kebebasan secara penuh kepada individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Dampaknya akan membuat monopoli atau oligopoli. Sedangkan sosialisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada individu dengan campur tangan pemerintah penuh, sehingga akan menimbulkan pemerintahan yang egaliter. Keduanya sangat bertolak belakang dengan ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Tujuan ekonomi Indonesia menurut Mohammad Hatta haruslah diarahkan bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang memuat dan berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan. (Mohammad Hatta, 1979)

Ekonomi Pancasila menjawab berbagai permasalahan yang ada pada Bangsa Indonesia. Emil Salim memberikan ciri-ciri ekonomi Pancasila dalam perannya sebagai pembangunan ekonomi.

1. Usaha negara maupun swasta tumbuh berdampingan tanpa dominasi salah satu untuk menghindari monopoli atau oligopoli dan perekonomian tumbuh dengan sehat.

2. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan tidak berdasarkan dominasi modal atau dominasi buruh.
3. Masyarakat menjadi pemegang peranan sentral tidak lagi individual, tekanan individu harus serasi dengan kepentingan masyarakat.
4. Negara memiliki hak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam negara tersebut akan tetapi harus berdasarkan konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana dan pengawas. (Mariatul Ulpa, Wowon Winarsih, 2022)

Gagasan tentang ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Karena ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu, sejalan, sesuai, dan setia pada nilai-nilai ideologi Pancasila. Dasar dari sistem ekonomi Pancasila sendiri adalah mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Pijakan yang harus dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam ekonomi Pancasila adalah konstitusi bangsa itu sendiri, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Sistem Ekonomi Pancasila menjadi sebuah sistem unik yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pengembangan dalam sistem ekonomi Pancasila akan berdasar pada pelaku-pelaku ekonomi rakyat. Mubyarto dalam bukunya menerjemahkan ide Bung Karno dan Bung Hatta bahwa ekonomi Pancasila adalah sektor kegiatan ekonomi wong cilik yang juga disebut sektor informal. Dimana terdapat petani, nelayan, peternak, pengrajin, pedagang kecil, dan sebagainya. Pada prinsipnya, dalam sistem ekonomi Pancasila, perkoperasian dimana asas kekeluargaan dijunjung merupakan soko guru perkonomian bangsa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomis dan juga dipertimbangkan oleh pertimbangan sosial moral. Pemerataan sebagai perwujudan solidaritas dan nasionalisme. Kekayaan alam dikuasai oleh negara akan tetapi peranan negara tidak dominan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, ekonomi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Masalah Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik atau berKetuhanan, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama menjadi basis pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip dari Sistem Eknomi Pancasila yaitu

1. bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial;
3. penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi;
4. koperasi menjadi penegak perekonomian; serta perlu adanya keseimbangan antaranya
5. perencanaan di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin keadilan sosial.

Ketimpangan ekonomi adalah sesuatu yang nyata terjadi diindonesia, hal ini menggambarkan bahwa belum terwujudnya pemerataan sosial yang merupakan pripsip dari ekonomi Pancasila itu sendiri. Bawazier mengungkapkan menggunakan pasal 33 UUD 1945 untuk menerangkan system ekonomi Pancasila dimana hakekat yang terkandung dalam pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan social menerangkan landasan pengaturan ekonomi negara Terdapat nilai-nilai penting yang menjadi pedoman pengaturan ekonomi negara, yakni : (Bawazier, 2010)

- Kekeluargaan
- Kebersamaan
- Kemandirian
- Keseimbangan kemajuan dan kesatuan

Keempat nilai tersebut merupakan gambaran makro ekonomi dengan sistem ekonomi pancasila yang menghendaki pemerataan dan pertumbuhan (kemakmuran) berjalan seiring, artinya pertumbuhan yang merata, bukan pertumbuhan dulu baru pemerataan. Hal ini merupakan hakekat dari nilai keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan. Nilai kekeluargaan dan kebersamaan memiliki hakekat bahwa untuk mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan umum dan keadilan social, maka pengelolaan ekonomi negara dilakukan secara bersama-sama dan mengedepankan nilai kekeluargaan yang seharusnya tidak ada ketimpangan dalam ekonomi.

Hakikat pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” mengandung arti dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila, hak individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak juga dipertimbangkan. Artinya sifat kebersamaan dan pemerataan tanpa menghilangkan hak individu untuk peningkatan taraf hidup melalui pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuannya.

Hal ini diperkuat dengan pasal 28 D no 2 “Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, mengandung arti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk pengembangan diri serta perlakuan yang manusiawi. Kedua pasal ini mencirikan nilai kemandirian dalam sistem ekonomi Indonesia.

Artinya prinsip kebersamaan dalam pengelolaan ekonomi bukan berarti setiap individu menjadi bergantung kepada individu lainnya. Melainkan kemajuan individu menjadi hak seluruh rakyat tanpa terkecuali sesuai dengan keinginan dan keahliannya masing-masing. Kebersamaan yang dimaksud dapat mendorong kemajuan bersama melalui sikap saling mendukung potensi yang terdapat pada masing-masing individu demi mencapai tujuan bersama. Artinya sistem ekonomi pancasila mengedepankan kepentingan bersama dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu untuk berkembang dan maju. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan individu untuk berkembang dan maju.

Pasal 28 H ayat 1 hingga 4 memperkuat penyelenggaraan sistem ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera materi dan batin. Artinya kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya bersumber dari materi, namun juga kesejahteraan yang sifatnya non-materi. Dimana terdapat nilai ketuhanan yang menjadi sumber rohani setiap individu. Maka terdapat nilai Ketuhanan yang menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan materi dan batin. Hal ini menggambarkan bahwa negara menjunjung tinggi kebutuhan hidup manusia yang sesungguhnya yakni jasmani dan rohani.

Keseimbangan inilah yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak jaminan social bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Peran pemerintah menjadi sentral dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Jadi peran pemerintah secara makro adalah membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk menikmati kesejahteraan materi dan batin ataupun sosial dan ekonomi tanpa adanya ketimpangan.

Ketimpangan yang serius dapat membahayakan keharmonisan dan persatuan masyarakat. Selain itu, ketimpangan tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila yang menuntut pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur telah menciptakan divisi yang merugikan bagi masyarakat. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ini, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan publik dengan tujuan mencapai keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Ketimpangan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. Ketimpangan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut secara umum antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi Pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat. Berikut data ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia :



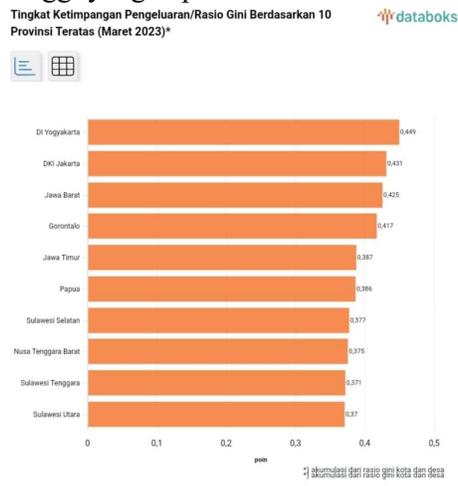
Berikut beberapa poin penting terkait dengan rasio Gini dan temuan yang dijelaskan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS):

1. Rasio Gini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi atau negara. Ini adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan ekonomi. Rasio Gini dinamai dari seorang ahli statistik Italia bernama Corrado Gini.
2. Rasio Gini: Rasio Gini mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan di masyarakat. Skalanya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (semua individu memiliki pengeluaran atau pendapatan yang sama), dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu individu memiliki semua pengeluaran atau pendapatan). Semakin tinggi nilai rasio Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan.
3. Trend Kenaikan dan Penurunan: Menurut laporan BPS, rasio Gini di Indonesia mengalami kenaikan kecil dari September 2022 (0,381) ke Maret 2023 (0,388).
4. Perkotaan vs. Perdesaan: Penyumbang peningkatan rasio Gini di Indonesia terutama berasal dari perkotaan. Rasio Gini perkotaan pada Maret 2023 adalah 0,409, yang

naik dari September 2022 (0,402). Sementara itu, rasio Gini di perdesaan tetap konstan pada 0,313 selama periode tersebut.

5. Arti Nilai Rasio Gini: Nilai-nilai rasio Gini diinterpretasikan sebagai tingkat ketimpangan ekonomi. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat ketimpangan dalam distribusi pengeluaran atau pendapatan. Penurunan rasio Gini biasanya dianggap sebagai tanda perbaikan dalam pemerataan ekonomi.

Yang kemudian terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi yang dapat dilihat dari data berikut:



1. Ketimpangan di Yogyakarta: Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia pada Maret 2023, meskipun terjadi penurunan rasio Gini dari 0,459 pada September 2022 menjadi 0,449. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meskipun tingkat ketimpangan masih tinggi.
2. Perbedaan dalam Perubahan Rasio Gini: Beberapa provinsi mengalami penurunan rasio Gini dari September 2022 ke Maret 2023, sementara provinsi lain mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi bervariasi di seluruh Indonesia.
3. Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Rendah: Di sisi lain, terdapat provinsi-provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah provinsi yang berhasil mencapai tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih baik. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di Yogyakarta antara lain:
 - a. Tumbuhnya ekonomi di sektor pariwisata dan pendidikan yang terlalu cepat
Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena sektor-sektor tersebut cenderung mempekerjakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan tinggi, sehingga kelompok ekonomi terbawah sulit untuk bersaing. Sektor pariwisata dan pendidikan yang berkembang pesat mungkin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Orang-orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang sesuai lebih mungkin mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi, sementara mereka yang tidak memiliki kualifikasi serupa akan tertinggal. Yang akibatnya terjadi juga Kesenjangan Gaji: Sektor

pariwisata dan pendidikan seringkali menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada sektor lain, terutama bagi individu dengan kualifikasi tinggi.

- b. Pembangunan hotel dan mal yang hanya memfasilitasi kelompok ekonomi menengah ke atas, sementara kelompok ekonomi terbawah tidak mengubah gaya hidupnya yang sederhana

Pembangunan hotel dan mal yang hanya memfasilitasi kelompok ekonomi menengah ke atas, sementara kelompok ekonomi terbawah tidak mengubah gaya hidupnya yang sederhana. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena kelompok ekonomi terbawah tidak dapat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Sumber daya ekonomi, peluang kerja, dan investasi lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah utama ini.

- c. Aktivitas ekonomi cenderung memusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Aktivitas ekonomi cenderung memusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sehingga terjadi ketimpangan di antara kabupaten/kota di provinsi itu. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena daerah-daerah lain di provinsi tersebut tidak mendapatkan manfaat yang sama dari aktivitas ekonomi.

- d. Pendatang dengan uang relatif banyak dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya bersekolah ke Yogyakarta

Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena pendatang tersebut cenderung memiliki akses yang lebih baik ke lapangan kerja dan sumber daya ekonomi lainnya.

- e. Upah minimum yang rendah

Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena pekerja dengan upah minimum cenderung memiliki akses yang lebih terbatas ke sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih baik

Untuk menghadapi tantangan ini secara umum, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat implementasi kebijakan, memperluas cakupan program yang sudah ada, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal yang menjadi penyebab pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan tersebut antara lain

1. Ketidaktepatan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks ekonomi di berbagai daerah sehingga mengurangi efektivitas dalam mengatasi ketimpangan.
2. Anggaran yang kurang memadai juga menjadi faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan. Jika pemerintah tidak memberikan dana yang memadai atau tidak mengelolanya secara efektif, program-program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Tingkat korupsi yang tinggi serta tidak adanya transparansi dapat menjadi terhambatnya pelaksanaan kebijakan. (Dony, 2020)

Sistem ekonomi Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Yogyakarta, beberapa solusi yang dapat diberikan sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila antara lain:

1. Pemerataan pembangunan: Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi Yogyakarta dapat mengalokasikan sumber daya dan investasi infrastruktur untuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Ini akan menciptakan peluang ekonomi baru di daerah-daerah tersebut, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

2. Peningkatan kualitas pendidikan: Investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Yogyakarta dengan membangun sekolah berkualitas, memberikan pelatihan guru yang baik, dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Ini akan membantu masyarakat lokal bersaing lebih baik dalam pasar kerja.
3. Kenaikan upah minimum: Menaikkan upah minimum adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pengusaha dan serikat pekerja untuk menetapkan upah minimum yang adil dan memadai. Ini akan memungkinkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian.
4. Pengembangan sektor ekonomi yang inklusif: Pengembangan sektor ekonomi yang inklusif, seperti sektor pertanian, industri kecil dan menengah (UKM), serta ekonomi kreatif, dapat membuka peluang pekerjaan bagi berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan, pelatihan, dan akses ke modal bagi pelaku usaha di sektor-sektor ini.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan sektor ekonomi yang inklusif, seperti sektor pertanian, industri kecil dan menengah (UKM), serta ekonomi kreatif, dapat membuka peluang pekerjaan bagi berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan, pelatihan, dan akses ke modal bagi pelaku usaha di sektor-sektor ini.
6. Pengawasan dan transparansi: Untuk mengatasi masalah korupsi dan memastikan efektivitas kebijakan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan transparansi. Mekanisme pengawasan yang kuat dan pelaporan transparan akan membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan dana yang tidak efisien.
7. Kolaborasi dengan pihak swasta dan Masyarakat: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil adalah kunci untuk mencapai tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Melalui kemitraan ini, berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja bersama untuk merancang dan melaksanakan program-program yang efektif.
8. Evaluasi dan perbaikan terus menerus: Pemerintah harus terus-menerus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Dengan melakukan evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Pancasila, diharapkan bahwa ketimpangan ekonomi di Yogyakarta dan seluruh Indonesia dapat berkurang secara signifikan. Upaya ini akan membantu mencapai tujuan negara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Ekonomi Pancasila menekankan kekeluargaan, gotong-royong, kemanusiaan, dan keadilan sebagai landasan utama. Analisis ketimpangan ekonomi mencakup aspek-aspek penting seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Rasio Gini menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang signifikan di beberapa provinsi, dengan perhatian khusus pada Yogyakarta. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi meliputi pertumbuhan sektor pariwisata dan pendidikan yang

cepat, pembangunan yang tidak merata, dan terpusatnya aktivitas ekonomi di daerah tertentu. Meskipun pemerintah telah berusaha mengatasi ketimpangan ekonomi, terdapat hambatan seperti ketidaktepatan kebijakan, anggaran yang kurang memadai, dan tingkat korupsi yang tinggi. Solusi yang diusulkan melibatkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, kenaikan upah minimum, pengembangan sektor ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan transparansi, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Jurnal ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah ketimpangan ekonomi, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Pancasila. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mencapai tujuan keadilan sosial yang diamanatkan oleh ideologi Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Anang, D., dan Al Qodar, P. S. 2020. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." "Jurnal Citizenship Virtues" 22(1): 251-262
- An-Nur. 2023. "Sistem Ekonomi Tradisional, Kapital, Komando dan Campuran." <https://an-nur.ac.id/sistem-ekonomi-tradisional-kapital-komando-dan-campuran/>.
- Bawazier, L. 2010. "Ekonomi Pancasila: Sebuah Pengantar". Kompas, hlm. 1.
Diakses pada 28 September 2023. <https://an-nur.ac.id/sistem-ekonomi-tradisional-kapital-komando-dan-campuran/>.
- Bachrawi Sanusi. 2000. "Sistem ekonomi: Suatu Pengantar". Jakarta: Lembaga Penerbit-Dumairy. 1996. "Perekonomian Indonesia". Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 28.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 56.
- Hatta, M. 1979. "Ekonomi Terpimpin". Jakarta: Penerbit Mutiara, hlm. 47.
- Repositori Kemdikbud. 2023. "Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi." Diakses pada 28 September 2023. [[https://repositori.kemdikbud.go.id/19921/1/Kelas%20X_Ekonomi_KD%203.2%20\(2\).pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/19921/1/Kelas%20X_Ekonomi_KD%203.2%20(2).pdf)]([https://repositori.kemdikbud.go.id/19921/1/Kelas%20X_Ekonomi_KD%203.2%20\(2\).pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/19921/1/Kelas%20X_Ekonomi_KD%203.2%20(2).pdf)).
- Sugiyanto, C. 2023. "Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila." <https://ugm.ac.id/id/berita/22531-revitalisasi-sistem-ekonomi-pancasila/>.
- Sumodiningrat, G. 1999. "Sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif". Jakarta: Impac Wahana Cipta, hlm. 78.
- Ulpa, M., Winarsih, W., dan Asbari, M. 2022. "Pancasila as a Paradigm of Economic Development in Indonesia." "Journal of Information Systems and Management (JISMA)" 1(4): 7.
- UIN Jakarta. 2023. "Oligarki dan Demokrasi." Diakses pada 28 September 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49940/1/AHMAD%20MUNJIN%20-%20SPS.pdf>.
- Universitas Pasundan. 2023. "Dasar Perekonomian." Diakses pada 28 September 2023. <http://repository.unpas.ac.id/57565/1/Dasar%20Perekonomian.pdf>.

